

**PENGARUH POLITIK UANG TERHADAP PERILAKU POLITIK
MASYARAKAT KOTA BANDAR LAMPUNG PADA
PEMILIHAN LEGISLATIF 2024**
(Studi di Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung)

(Skripsi)

Oleh
EFRILDO ZALERICO FARKARONI
2016021070



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

PENGARUH POLITIK UANG TERHADAP PERILAKU POLITIK MASYARAKAT KOTA BANDAR LAMPUNG PADA PEMILIHAN LEGISLATIF 2024

(Studi di Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung)

Oleh

EFRILDO ZALERICO FARKARONI

Pemilihan legislatif sebelumnya selalu diwarnai dengan adanya pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh para caleg. Pada pemilihan legislatif tahun 2024 di Kota Bandar Lampung, Kecamatan Kedaton ditemukan praktik politik uang yang dilakukan oleh caleg. Hal tersebut, memunculkan pertanyaan penelitian, bagaimana pengaruh politik uang terhadap perilaku politik masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh politik uang terhadap perilaku politik masyarakat Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung pada pemilihan legislatif 2024.

Penelitian ini menggunakan teori politik uang sebagai variabel (x) indepeden dengan indikator yaitu pemberian uang, pemberian barang, dan pemberian janji, serta teori perilaku politik sebagai variabel (y) depeden dengan indikator yaitu pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, dan pilihan rasional. Metode yang digunakan adalah kuantitatif korelasional dengan pendekatan behaviorisme, melibatkan data primer dan data sekunder melalui proses penyebaran kuesioner dengan 99 responden dari masyarakat Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung.

Hasil penelitian, menjelaskan bahwa politik uang memiliki pengaruh terhadap perilaku politik masyarakat Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung pada pemilihan legislatif 2024. Rata-rata masyarakat memiliki pekerjaan swasta dan menganggap bahwa keuntungan yang didapatkannya dari politik uang tersebut dapat digunakan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Politik uang cenderung mengurangi nilai nilai demokrasi masyarakat dalam politik dan menurunkan pemilu yang sehat atau menyebabkan perilaku politik yang tidak sehat, sehingga masyarakat memilih berdasarkan uang atau barang yang diterima daripada berdasarkan penilaian terhadap calon atau partai.

Kata Kunci: Politik Uang, Perilaku Politik, Pemilihan Legislatif

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF MONEY POLITICS ON THE POLITICAL BEHAVIOR OF THE COMMUNITY OF BANDAR LAMPUNG CITY IN THE 2024 LEGISLATIVE ELECTION (Study in Kedaton District, Bandar Lampung City)

By

EFRILDO ZALERICO FARKARONI

Previous legislative elections have always been marked by violations committed by legislative candidates. In the 2024 legislative elections in Bandar Lampung City, Kedaton District, money politics practices were found to be carried out by legislative candidates. This raises the research question, how does money politics influence people's political behavior. This study aims to determine the influence of money politics on the political behavior of the people of Kedaton District, Bandar Lampung City in the 2024 legislative elections. This study uses the theory of money politics as an independent variable (x) with indicators, namely giving money, giving goods, and making promises, and the theory of political behavior as a dependent variable (y) with indicators, namely the sociological approach, psychological approach, and rational choice. The method used is quantitative correlation with a behavioral approach, involving primary data and secondary data through the process of distributing questionnaires to 99 respondents from the people of Kedaton District, Bandar Lampung City. The results of the study explain that money politics has an influence on the political behavior of the people of Kedaton District, Bandar Lampung City in the 2024 legislative elections. On average, people have private jobs and assume that the profits they get from money politics can be used to meet their daily needs. Money politics tends to reduce active community participation in politics and reduce healthy political participation or cause unhealthy political behavior, so that people choose based on the money or goods received rather than based on their assessment of candidates or parties.

Keywords: Money Politics, Political Behavior, Legislative Elections

**PENGARUH POLITIK UANG TERHADAP PERILAKU POLITIK
MASYARAKAT KOTA BANDAR LAMPUNG PADA
PEMILIHAN LEGISLATIF 2024**
(Studi di Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung)

Oleh
EFRILDO ZALERICO FARKARONI
2016021070

(Skripsi)

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024

Judul Skripsi : **PENGARUH POLITIK UANG
TERHADAP PERILAKU POLITIK
MASYARAKAT KOTA BANDAR
LAMPUNG PADA PEMILIHAN
LEGISLATIF 2024 (Studi di Kecamatan
Kedaton Kota Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Efrildo Zalerico Farkaroni**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2016021070**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Budi Harjo, S.Sos., M.IP.
NIP. 196801121998021001

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

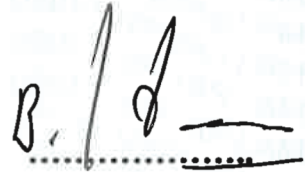


Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP 196112181989021001

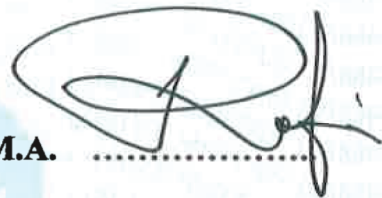
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Budi Harjo, S.Sos., M.IP.**



Penguji : **Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP 196108071987032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 12 Agustus 2024

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 12 Agustus 2024
Yang Membuat Pernyataan



20.000
Rp
METERAI
TEMPEL
F7ALX286720937

Efrildo Zalerico Farkaroni
NPM. 2016021070

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Efrildo Zalerico Farkaroni, dilahirkan di Gisting pada tanggal 04 April 2001 yang merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, putra dari Bapak Suparlan dan ibu Hartini.

Jenjang pendidikan Penulis dimulai dari TK PKK pada tahun 2006-2007, dilanjutkan di SDN 1 Gisting Atas pada tahun 2007-2013. Setelah lulus SD, Penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Gisting pada tahun 2013-2016. Kemudian Penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Kebangsaan Lampung Selatan pada tahun 2016-2019. Pada tahun 2020 Penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan dinyatakan lulus pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung tahun 2020.

Selama masa perkuliahan di Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unila penulis mengikuti berbagai kegiatan kampus baik akademik maupun non akademik dalam mengasah kemampuan diri Penulis. Penulis bergabung pada Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Pemerintahan sebagai Anggota Biro 5 Komunikasi dan Informasi pada periode 2022. Selanjutnya Penulis juga bergabung pada organisasi dan komunitas diluar kampus. Penulis bergabung pada Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Sosial Politik Universitas Lampung sebagai Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi pada periode 2023. Penulis bergabung pada komunitas Ruang Edit Indonesia sebagai Anggota Aktif. Selanjutnya Penulis bergabung pada komunitas Zoom Fotografi Lampung sebagai Anggota. Pada saat menjadi mahasiswa, Penulis

mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2023 di Desa Tanjung Jati Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat. Selanjutnya Penulis ikut serta dalam program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung.

MOTTO

“Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”

(Q.S At-Talaq: 4)

“Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

(Q.S An-Nahl: 18)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamiin Penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini

Shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW
Semoga kelak karya ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat

Karya Tulis ini khusus saya persembahkan kepada:

Bapak dan Ibu tercinta

Suparlan dan Hartini

Terima kasih atas semua dukungan, semangat, kesabaran, cinta, kasih sayang, cucuran keringat dan pengorbanan serta do'a yang telah menghantarkan anaknya menuju gerbang kesuksesan.

Terima kasih untuk keluarga Besar **“Jurusan Ilmu Pemerintahan”** dan
Almamater tercinta **“Universitas Lampung”**

SANWACANA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, dengan judul **“Pengaruh Politik Uang Terhadap Perilaku Politik Masyarakat Kota Bandar Lampung Pada Pemilihan Legislatif 2024 (Studi di Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung)”**. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, utusan Allah SWT yang membawa petunjuk kepada seluruh umat manusia.

Skripsi yang berjudul **“Pengaruh Politik Uang Terhadap Perilaku Politik Masyarakat Kota Bandar Lampung Pada Pemilihan Legislatif 2024 (Studi di Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung)”** sebagai salah satu syarat bagi Penulis untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan pada penulisan skripsi ini. Selesaiannya skripsi ini tidak luput dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Melalui sanwacana ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, diantaranya:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan, terima kasih Bapak atas kritik, saran dan masukannya sehingga Penulis membuat skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

4. Bapak Budi Harjo S.Sos, M.IP., selaku Dosen Pembimbing Utama yang senantiasa meluangkan waktu dan ilmunya serta memberi bimbingan, kritik, saran dan masukannya kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan serta membalas segala kebaikan Pak Budi Harjo.
5. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan S.IP, M.A., selaku Dosen Pembahas yang senantiasa meluangkan waktunya memberi bimbingan, kritik, saran dan masukannya kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan serta membalas segala kebaikan Bapak.
6. Bapak Himawan Indrajat S.I.P, M.I.P, selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis, terima kasih atas ilmu dan pembelajarannya.
7. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung meski tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas pengalaman dan ilmu yang telah diberikan.
8. Kepada kedua orang tua penulis, Bapak Suparlan dan Ibu Hartini yang selalu memberikan dukungan, semangat, kesabaran, cinta, kasih sayang, cucuran keringat dan pengorbanan yang luar biasa serta do'a yang tiada hentinya telah menghantarkan anaknya menuju gerbang kesuksesan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, perlindungan, dan kebahagiaan serta membalas segala kebaikan Bapak dan Ibu tercinta.
9. Kepada Kakak Penulis Mba Ryen Nawang Octismabellanti, A.Md.Keb. terima kasih sudah membimbing dan memberikan nasihatnya untuk Penulis. Dan adik penulis Frizalas Zalenocta Farkaroni yang membuat hidup semakin lengkap dan indah.
10. Kepada Chania Ilma Agustina, terima kasih banyak sudah menjadi *support system* penulis pada hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi. Selalu menemani dan mendampingi Penulis selama penulisan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi tempat curhat, diskusi, keluh kesah Penulis, pendengar yang sangat baik, dan menjadi *partner* berdiskusi atas segala hal.

11. Kepada Ibu Erni, terima kasih banyak selalu memberikan dukungan, semangat, dan nasihatnya serta segala kebaikan yang sudah diberikan kepada Penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, perlindungan, dan kebahagiaan serta membalas segala kebaikan Ibu.
12. Kepada Sahabat Penulis M. Arya Maulana S.I.P, terima kasih atas kebaikan yang telah di berikan serta telah membantu dan memotivasi Penulis agar segera menyelesaikan skripsi yang tidak mudah ini.
13. Kepada Sahabat Penulis "*The Javanance*", M. Arya Maulana S.I.P, Bregito Firgiawan, Diska Amanda Hamidi, Zacky Mauladin Aryadzikara, dan Garis Adistya Grafito terima kasih telah mewarnai hari-hari penulis menjadi lebih indah.
14. Kepada saudara-saudaraku "*Dhevandra*", Adabi, Adit, Aliyun, Iqballe, Yusril, Kikew, Anam, dan Oda terimakasih telah membersamai serta menjadi saudara yang bersedia berbagi cerita suka duka dan pengalaman yang luar biasa.
15. Kepada teman-teman seperjuangan Krisna Bayu, Farid, Afwan, Rapli Santosa, Gilang, Tegas, Tama, Fadhlhan, Wayan Rendi, Syendi, Yuan, Lupi, Novika, Farhan, Rayhan, Ramadhan serta seluruh teman-teman Jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2020 yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih atas dukungan dan bantuannya serta kebersamaan dalam suka duka selama perkuliahan.
16. Kepada teman-teman Komsospol angkatan 2020, Ramadhan, Zaky, Diska, Rayhan, Rafly, Fariko, Yulisa, dan Ainun yang memberi banyak bumbu cerita kehidupan, pengalaman, senang duka dalam berhimpun, sehingga banyak pelajaran yang penulis petik dari hal tersebut.
17. Kepada rekan-rekan HMJ Ilmu Pemerintahan, Bang restu, Mba Agnes, Mba Roro, Bang Farhan, Mba Erika, Zaki, Diska, Arya serta seluruh teman-teman HMJ Ilmu Pemerintahan angkatan 2020 yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas pengalaman dan pembelajaran semasa perkuliahan.

18. Kepada seluruh responden penelitian yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas segala bantuannya.
19. Kepada teman-teman “KKN Tanjung Jati 2023”, Firman, Gede, Radila, Meilisa, Rifka, Sipa, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis.
20. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, keberkahan, dan membalas segala kebaikan yang telah kalian berikan kepada Penulis. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan. Namun, Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Aamiin.

Bandar Lampung 12 Agustus 2024
Penulis,

Efrildo Zalerico Farkaroni

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR SINGKATAN	vi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.2 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tinjauan Politik Uang	11
2.1.1 Pengertian Politik Uang.....	11
2.1.2 Bentuk Politik Uang	13
2.2 Perilaku Politik	16
2.2.1 Definisi Perilaku Politik	16
2.2.2 Faktor Perilaku Politik.....	16
2.2.3 Pendekatan Perilaku Memilih.....	17
2.3 Politik Uang dalam mempengaruhi Perilaku Politik pada Pemilihan Legislatif.....	20
2.4 Kerangka Pikir	23
2.5 Hipotesis Penelitian	24
III. METODE PENELITIAN	25
3.1 Tipe Penelitian.....	25
3.2 Lokasi Penelitian.....	26
3.3 Fokus Penelitian.....	26
3.4 Sumber Data.....	26
3.4.1 Data Primer.....	26
3.4.2 Data Sekunder	27
3.5 Definisi Konseptual dan Operasional	27
3.5.1 Definisi Konseptual	27

3.5.2	Definisi Operasional	28
3.6	Populasi.....	30
3.7	Sampel.....	31
3.8	Teknik Pengumpulan Data	32
3.8.1	Kuesioner.....	32
3.8.2	Dokumentasi.....	33
3.9	Teknik Penentuan Skor	33
3.10	Teknik Pengujian Instrumen	34
3.10.1	Uji Validitas	34
3.10.2	Uji Realibilitas.....	35
3.11	Teknik Analisis Data	35
3.11.1	Uji Normalitas	35
3.11.2	Uji Linearitas	36
3.11.3	Uji Heteroskedastisitas	37
3.11.4	Koefisien Determinasi	37
3.11.5	Hipotesis	38
IV.	HASIL DAN PEMBAHASAN	40
4.1	Gambaran Umum.....	40
4.1.1	Profil Kecamatan Kedaton	40
4.1.2	Kondisi Geografis dan Demografis Kecamatan Kedaton.....	41
4.1.3	Peta Daerah Pemilihan DPRD Kota Bandar Lampung Tahun 2019	43
4.1.4	Hasil Pemilihan Legislatif Kota Bandar Lampung Tahun 2019	44
4.1.5	Peta Daerah Pemilihan DPRD Kota Bandar Lampung Tahun 2024	45
4.1.6	Hasil Pemilihan Legislatif Kota Bandar Lampung Tahun 2024	46
4.2	Hasil dan Pembahasan	48
4.2.1	Identitas Responden.....	48
4.2.2	Hasil Kuesioner Politik Uang (X).....	51
4.2.3	Hasil Kuesioner Perilaku Politik (Y).....	55
4.2.4	Uji Validitas dan Uji Realibilitas	59
4.2.5	Analisis Data.....	61
3.2.6	Uji Hipotesis	65
3.2.7	Pengaruh Politik Uang terhadap Perilaku Politik Masyarakat Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung	69
3.2.8	Bentuk Pelanggaran Politik Uang di Kecamatan Kedaton	75
V.	SIMPULAN DAN SARAN.....	77
5.1	Simpulan	77
5.2	Saran.....	78
	DAFTAR PUSTAKA.....	79

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Definisi operasional dari variabel yang akan diteliti	30
2. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung .	31
3. Alternatif Jawaban dengan skala <i>likert</i>	33
4. Luas wilayah Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.....	42
5. Jumlah Penduduk di Kecamatan Kedaton	42
6. Daftar Daerah Pemilihan DPRD Kota Bandar Lampung 2019	43
7. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Bandar Lampung Pemilu 2019.....	43
8. Daftar Anggota Legislatif Terpilih Dapil 3 Kota Bandar Lampung 2019 ...	44
9. Daftar Daerah Pemilihan DPRD Kota Bandar Lampung 2024	45
10. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Bandar Lampung Pemilu 2024.....	45
11. Daftar Anggota Legislatif Terpilih Dapil 4 Kota Bandar Lampung 2024 ...	46
12. Rekapitulasi Suara DPRD Kota Bandar Lampung di Kecamatan Kedaton.....	47
13. Hasil Validitas Skala Politik Uang.....	59
14. Hasil Validitas Skala Perilaku Politik	60
15. Hasil Uji Realibilitas Skala Politik Uang	60
16. Hasil Uji Realibilitas Skala Perilaku Politik.....	60
17. Hasil Uji <i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>	62

18. Hasil Uji Linearitas.....	63
19. Hasil Uji Heterokedastisitas	65
20. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana	66
21. Koefisien Determinasi	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir	23
2. Peta Administrasi Kota Bandar Lampung.....	42
3. Diagram Anggota Legislatif Terpilih Dapil 4 Kota Bandar Lampung.....	47
4. Data responden berdasarkan Jenis Kelamin.....	49
5. Data Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	49
6. Data Responden berdasarkan pekerjaan	50
7. Indikator Pembelian Suara (<i>Vote Buying</i>)	51
8. Indikator Pemberian Barang Pribadi (<i>Individual Gift</i>)	53
9. Indikator Pemberian Barang Kelompok (<i>Club Goods</i>).....	54
10. Indikator pendekatan sosiologis.....	55
11. Indikator pendekatan psikologis	56
12. Indikator pendekatan pilihan rasional	57
13. Kurva dua sisi pengujian t-hitung	67
14. Pemberian barang dari caleg partai PSI	75
15. Pemberian sembako dan uang tunai dari caleg partai Gerindra.....	75
16. Pemberian uang tunai dari caleg partai Demokrat	76
17. Pemberian sejumlah uang dari caleg PDIP kepada oknum penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu Kecamatan Kedaton	76

DAFTAR SINGKATAN

Bawaslu	: Badan Pengawas Pemilu
Caleg	: Calon Legislatif
DKPP	: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
PDI-P	: Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan
Pemilu	: Pemilihan Umum
PKPU	: Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Pileg	: Pemilihan Legislatif
TPS	: Tempat Pemungutan Suara
UUD	: Undang Undang Dasar

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsep kedaulatan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dimiliki oleh rakyat. Pemahaman ini kemudian dikembangkan sebagai landasan untuk mengelola negara dengan prinsip demokratis. Menurut Fuady (2010), demokrasi merujuk pada sistem pemerintahan di mana warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan negara dan mengawasi pelaksanaan kekuasaan melalui media publik atau melalui perwakilan yang telah dipilih untuk menduduki posisi kekuasaan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut demokrasi dengan perwakilan rakyat. Dalam sistem demokrasi rakyat memiliki hak pilih yang digunakan dengan tujuan merubah hidupnya. Sebagai bentuk demokratisasi, negara yang menganut sistem demokrasi perlu mengadakan pemilihan umum guna memilih pemimpin baru. Pemilihan umum merupakan syarat mutlak dalam merawat demokrasi.

Pemilihan umum adalah sebuah proses memilih seseorang yang akan mengisi suatu jabatan politik tertentu secara sah. Diantaranya, jabatan politik yang dimaksud adalah presiden dan wakilnya, wakil rakyat yang tersebar diberbagai daerah, lembaga legislatif hingga pada kepala desa. Pemilu diartikan sebagai sebuah upaya dalam memberikan pengaruh pada masyarakat yang bersifat persuasif (tidak memaksa) melalui aktivitas retorika, komunikasi massa, hubungan politik, lobi dan kegiatan lainnya. Pemilu telah tertulis di dalam

hukum positif Indonesia yakni dalam UUD 1945 Bab VII B Pemilihan Umum Pasal 22 (Budiardjo, 2008).

Sedangkan pemilihan legislatif merupakan sebuah metode yang digunakan untuk memilih anggota legislatif selama lima (5) tahun kedepan sebagai lembaga legislasi yang membuat Undang-Undang, *budgeting* dan juga pengawasan. Anggota legislatif yang dipilih melalui pemilihan legislatif terdiri dari: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Adapun lembaga legislatif di tingkat lokal yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi) dan (DPRD Kabupaten/Kota).

Pada tahun 2024, pemilihan legislatif (Pileg) digelar secara bersamaan dengan pemilihan umum presiden (Pilpres) tepatnya pada tanggal 14 Februari 2024. Pelaksanaan pemilihan umum anggota legislatif dan presiden secara serentak merupakan hal baru yang terjadi di Indonesia. Adapun pemilihan umum legislatif 2024 tersebut guna memilih 580 anggota DPR RI, 152 anggota DPD, dan memilih anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kab/Kota se-Indonesia (KPU RI, 2024).

Dalam pelaksanaan pemilu, tentu terdapat peserta pemilu yang saling berkompetisi untuk memenangkan jabatan yang dituju. Elemen yang saling berkompetisi guna memenangkan jabatan tersebut diantaranya meliputi partai politik, calon anggota legislatif, hingga calon pejabat eksekutif. Untuk dapat memenangkan pemilu tersebut, para peserta pemilu perlu mendapat suara dan dukungan dari rakyat. Dalam mendapatkan simpatik dari rakyat ini biasanya para peserta pemilu melakukan kegiatan persuasi politik dalam bentuk kegiatan kampanye.

Untuk meraih kursi legislatif di Kota Bandar Lampung, para calon saling berkompetisi dalam mendapatkan dukungan suara dari masyarakat. Faktor terpenting yang harus dicapai oleh caleg adalah jumlah perolehan suara pada hari pemungutan suara. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk

mendulang suara melalui pendekatan terhadap masyarakat. Yaitu, membuat kegiatan seperti debat politik, kampanye politik maupun mengunjungi wilayah masyarakat. Hal inilah yang menjadi proses persaingan dalam rangka mendapatkan dukungan suara dari masyarakat.

Di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye pemilu dinyatakan bahwa, kampanye pemilu yang berikutnya disebut kampanye merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peserta pemilu dan kelompoknya untuk membujuk masyarakat dengan menawarkan visi, misi, program, hingga citra diri.

Saat ini pelaksanaan kampanye dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai macam media, seperti kampanye secara langsung, kampanye elektronik, maupun kampanye cetak. Kampanye secara langsung merupakan media kampanye yang dilakukan secara tatap muka. Pada kampanye ini, calon kandidat bermaksud muncul serta menemui masyarakat guna menyampaikan visi misi hingga program yang akan dijelankannya. Kemudian yaitu kampanye elektronik, ialah proses promosi visi-misi yang dilakukan melalui media elektronik. Hal ini seperti melalui media sosial, TV, hingga radio. Kemudian kampanye cetak, ialah kampanye yang dilakukan dengan media cetak. Hal ini seperti menggunakan poster, selebaran, brosur, hingga memasang baliho bergambar kandidat beserta program-programnya (Martiah, 2022).

Suara merupakan komoditas utama dalam mempengaruhi elektoral. Umumnya para calon melakukan segala cara demi memperoleh suara. Salah satu cara yang dilakukan adalah melalui praktik politik uang. Dalam konteks elektoral, politik uang merupakan alat pembelian suara yang dimaknai sebagai bantuan politis dan wujud timbal balik (*reciprocity*) atau sebuah pertukaran sosial yang memang biasa terjadi dalam realitas permainan politik (Muhtadi, 2019).

Dalam buku Kuasa Uang: Politik dalam Pemilu Pasca-Orde Baru (Muhtadi, 2020) meskipun politik uang tidak selalu efektif untuk meraih kemenangan,

caleg yang tidak melakukannya dijamin akan mengalami kekalahan. Berdasarkan hal tersebut politik uang merupakan salah satu cara yang sering digunakan. Dengan demikian politik uang masih menjadi praktik yang kerap terjadi pada pemilihan umum dan mengalami kenaikan merujuk pada data di atas. Namun, meskipun mengalami kenaikan pembuktian terhadap politik uang masih sulit terungkap.

Politik uang tentu saja merupakan praktik kotor dalam pemilu dan dinilai dapat mencederai elektabilitas pada sistem demokrasi yang ada di Indonesia (Suryani, 2019). Selain pembodohan terhadap pemilih, hal ini akan membuat persaingan antar calon dan partai menjadi lebih tidak seimbang. Partai politik yang memiliki banyak uang akan cenderung memenangkan pemilihan dengan mudah (Abdurrohhman, 2021).

Pada pemilihan legislatif, kita tidak akan terlepas dari perilaku politik karena hal tersebut yang akan menentukan pilihan politik seseorang. Perilaku politik sendiri berkaitan dengan pemikiran yang berasal dalam diri untuk menentukan pilihan politik. Menurut (David, 1985), perilaku politik merupakan tindakan individual yang dipengaruhi oleh pengetahuan politik, kepercayaan, dan kebudayaan yang berlaku di masyarakat terkait politik. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perilaku politik merupakan sebuah reaksi dari individu terhadap aktivitas perpolitikan.

Perilaku politik masyarakat dapat dikatakan sehat apabila terdapat perilaku politik berupa partisipasi dalam pemilihan, sosialisasi, dan komunikasi yang baik dari para calon legislatif kepada masyarakat. Pada bentuk sosialisasi dan komunikasi yaitu penyampaian visi-misi maupun program kerja caleg yang dilaksanakan jauh sebelum hari pemungutan suara. Banyak cara yang dilakukan di lapangan termasuk juga cara yang mengabaikan etika politik yaitu, teror dan politik uang.

Pelanggaran politik uang selalu terjadi dari pelaksanaan pemilu pertama kali tahun 1955 sampai dengan sekarang, pelanggaran terhadap politik uang yang selalu terjadi ini akan membunuh rasa demokrasi dan juga menghilangkan asas pemilihan umum yakni asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Banyaknya kasus pelanggaran politik uang tersebut tersebar dari berbagai daerah di Indonesia, salah satunya di Provinsi Lampung.

Seperti yang terjadi pada proses pemilihan legislatif 2024 di Kota Bandar Lampung oleh calon legislatif (Caleg) dari partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pada selama proses pemilu baik dari tahapan kampanye sampai hari pencoblosan di Kecamatan Kedaton diketahui bahwa Caleg dari partai PDI-P tersebut terlibat dalam kasus praktik politik uang. Berdasarkan data yang telah di publikasikan melalui beberapa media elektronik yang ada, seperti pada media elektronik Kupastuntas.co, Kompas.com, Antara News, Rilis Id . Berdasarkan dari data yang ada pada media tersebut sudah jelas bahwa dalam pemilihan legislatif di Kota Bandar Lampung, Dapil IV khususnya di Kecamatan Kedaton terdapat praktik politik uang.

Sebelum memulai penelitian yang lebih mendalam tentang politik uang di Kecamatan Kedaton, peneliti terlebih dahulu melakukan pra riset yang dirancang untuk mendapatkan gambaran awal mengenai persepsi dan pengalaman masyarakat setempat. Pra riset ini mencakup wawancara yang dilakukan dalam kurun waktu 14 maret sampai dengan 20 maret 2024 di dua kelurahan yaitu kepada 4 warga kelurahan Sidodadi dan 1 warga kelurahan Surabaya di Kecamatan Kedaton, dengan tujuan untuk mengetahui persebaran pelanggaran politik uang, bentuk pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh caleg dan tingkat kesadaran masyarakat tentang praktik politik uang di Kecamatan Kedaton.

Peneliti berhasil menemukan dan mengidentifikasi temuan mengenai fakta baru yang di mana persebaran pelanggaran politik uang ini terjadi menyebar secara merata di dua kelurahan tersebut yang dimana hal tersebut juga terjadi di lima

kelurahan lainnya. Kemudian peneliti menemukan fakta bahwa tidak hanya dari caleg PDI-P saja yang melakukan pelanggaran politik uang akan tetapi hampir seluruh caleg dari partai yang berbeda beda melakukan pelanggaran politik uang. Contohnya beberapa caleg dari partai Nasdem, PDI-P, PSI, PKB dan Gerindra. Pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh caleg meliputi beberapa bentuk seperti uang tunai, sembako, payung, tumbler, dan topi.

Dari banyaknya kasus pelanggaran politik uang yang dilakukan caleg di pemilihan legislatif di Kecamatan Kedaton tahun 2024, politik uang terbukti tidak selalu menjadi penentu kemenangan. Meskipun ada kandidat yang berusaha mempengaruhi pemilih dengan menawarkan imbalan finansial tetapi hal tersebut tidak menjadi kunci utama agar masyarakat mau memilih. Karena pada hasil pemilihan legislatif beberapa caleg terutama di Kecamatan Kedaton yang menggunakan politik uang gagal menduduki kursi legislatif DPRD Kota Bandar Lampung. Terbukti pada kasus caleg PDI-P yang sudah menggunakan praktik kotor politik uang, namun tidak terpilih. Akan tetapi ada beberapa caleg yang menggunakan praktik kotor politik uang terpilih menjadi anggota legislatif. Contohnya beberapa caleg dari partai Nasdem, PDI-P, PKS, dan Gerindra.

Pada pemilihan legislatif, tentu kita tidak akan terlepas dari perilaku politik karena hal tersebut yang akan menentukan pilihan politik seseorang. Perilaku politik sendiri berkaitan dengan pemikiran yang berasal dalam diri untuk menentukan pilihan politik. Menurut (David, 1985), perilaku politik merupakan tindakan individual yang dipengaruhi oleh pengetahuan politik, kepercayaan, dan kebudayaan yang berlaku di masyarakat terkait politik. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perilaku politik merupakan sebuah reaksi dari individu terhadap aktivitas perpolitikan.

Dengan banyaknya fenomena politik uang dan berdasarkan kasus yang terjadi pada pemilu 2024 yang telah dipaparkan diatas pada pemilihan legislatif 2024 di Dapil VI khususnya Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, yang

dimana ada caleg yang melakukan pelanggaran politik uang kemudian terpilih menjadi anggota legislatif dan banyak caleg yang melakukan pelanggaran politik uang tetapi gagal terpilih menjadi anggota legislatif sehingga peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh politik uang terhadap perilaku politik masyarakat di kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.

Sebagai bahan referensi atas penelitian ini, Peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan pengaruh politik uang terhadap perilaku politik masyarakat kota Bandar Lampung pada pemilihan legislatif yang dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan, dan bahan referensi dalam mengadopsi konsep, serta pembangunan kerangka pikir. Penelitian terdahulu diantaranya:

Pertama, Penelitian (Juma'ah, DKK, 2017), membahas perilaku politik masyarakat Lombok Timur yang dikaitkan dengan konflik Nahdlatul Wathan. Perilaku politik masyarakat desa Anjani dan Pancor termasuk kategori Spektator (mengetahui proses dan situasi politik tapi tidak ikut terlibat langsung). Adapun korelasi antara konflik dan perilaku politik sangat lemah dengan perolehan angka 2,5%. Terdapat tiga penyebab rendahnya korelasi konflik terhadap perilaku politik, yaitu: pertama, tahapan konflik mengalami de-eskalasi pada 2010 sehingga masyarakat menganggap konflik telah selesai. Kedua, adanya ketakutan mengisi responden sehingga banyak memilih jawaban netral. Ketiga, banyak responden yang tidak merasakan konflik secara langsung. Jika penelitian Juma'ah menggunakan variabel konflik namun penelitian peneliti menggunakan variabel politik uang. Hal tersebut akan mempengaruhi perbedaan dalam penyajian data pada penelitian peneliti.

Kedua, (Mensana, 2020), meneliti tentang perilaku politik pemilih remaja di Surabaya menjelang pemilu 2019 yang dikaitkan dengan kepercayaan politik. Penelitian ini memfokuskan pada intensitas untuk memilih dari pemilih remaja. Yang mana intensi mereka untuk memilih berdasarkan pada dimensi kepercayaan politik, berupa unsur kemampuan calon presiden dan wakil

presiden menempati urutan tertinggi.

Ketiga, Yusuf Humaidi (2017) menganalisis fenomena politik uang dan perilaku politik pada Pemilihan Legislatif 2014 di Kelurahan Bangka, Jakarta Selatan menggunakan metode kualitatif. Adapun politik uang yang terjadi adalah pemberian uang dalam bentuk sembako dan penyediaan fasilitas kesehatan berupa unit mobil ambulan dari beberapa caleg. Terdapat pula caleg yang membawa tokoh agama untuk membangun citra sebagai penganut agama yang baik. Yusuf juga menemukan bahwa pilihan politik warga RW 01 tidak terlepas dari pengaruh politik uang.

Keempat, Shabrina (2018), mengangkat permasalahan tentang paparan dari pengaruh keluarga terhadap perilaku politik dengan melihat pada latar belakang keluarga dan sosialisasi politik dalam keluarga. Penelitian dilakukan pada mahasiswa fakultas bidang sosial dan sains di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hasilnya latar belakang keluarga memiliki pengaruh terhadap perilaku politik dengan menunjukkan korelasi yang tinggi dan positif sebesar 9,38%. Sedangkan Sosialisasi Politik memiliki pengaruh terhadap perilaku politik termasuk korelasi yang tinggi dan positif pula dengan perolehan 10,99%. Sisanya sebanyak 79,07% terdapat pada aspek lain diluar latar belakang keluarga dan sosialisasi politik keluarga yang kemungkinan memiliki pengaruh terhadap perilaku politik.

Kelima, Susilawati (2021), mengangkat tema tentang dampak dari mengakses instagram @pinterpolitik terhadap perilaku politik generasi z pada pemilu 2019 dengan menggunakan metode kuantitatif. Penelitian yang dilakukan pada remaja di Banda Aceh ini menyimpulkan bahwa terdapat korelasi dan hubungan yang positif dengan perolehan nilai 0,302. Penelitian ini peneliti menggunakan variabel politik uang dan dilakukan pada masyarakat Desa Kalongan. Hal tersebut tentu berbeda dengan penelitian Susilawati, DKK.

Secara keseluruhan dari kelima penelitian terdahulu yang telah dirangkum, memiliki persamaan yaitu membahas mengenai pengaruh politik uang terhadap perilaku politik masyarakat. Namun, terdapat perbedaan dan pembaharuan dalam penelitian yang ingin diteliti oleh peneliti dengan penelitian-penelitian terdahulu di atas. Pertama, dari segi lokasi, objek, dan waktu penelitian yang memiliki karakteristik berbeda. Tentunya, setiap daerah memiliki sumber daya manusia (SDM) masyarakat yang berbeda-beda dalam menyikapi praktik politik uang. Karena pada dasarnya setiap daerah memiliki kultur budaya dan sosial yang berbeda. Untuk itu, peneliti menilai bahwa hal ini merupakan perbedaan yang cukup signifikan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka penelitian ini ingin memfokuskan pada pengaruh praktik politik uang yang dilakukan calon legislatif serta dampaknya pada perilaku politik masyarakat. Pada penelitian ini maka peneliti mengambil tema “Pengaruh Politik Uang Terhadap Perilaku Politik Masyarakat Kota Bandar Lampung Pada Pemilihan Legislatif 2024 (Studi di Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah adakah Pengaruh Politik Uang Terhadap Perilaku Politik Masyarakat Kota Bandar Lampung Pada Pemilihan Legislatif 2024 (Studi di Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung)?

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Politik Uang Terhadap Perilaku Politik Masyarakat Kota Bandar Lampung Pada Pemilihan Legislatif 2024 (Studi di Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung).

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini berupaya menganalisis sebuah fenomena dalam masyarakat menggunakan teori-teori yang telah peneliti dapatkan dalam proses perkuliahan di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Dengan demikian peneliti mengharapkan bahwa penelitian ini menjadi wujud dalam mengimplementasikan teori tersebut di kehidupan sehari-hari dan mampu memperluas wawasan pengetahuan serta pengalaman bagi peneliti.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran tentang pengaruh politik uang terhadap perilaku politik masyarakat kota Bandar Lampung pada pemilihan legislatif 2024 (Studi di Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung). Selain itu, peneliti mengharapkan hasil dari penelitian ini nantinya mampu memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan rujukan atau sebagai data pendukung penelitian selanjutnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Politik Uang

2.1.1 Pengertian Politik Uang

Menurut (Sumartini, 2004), politik uang merupakan sebuah upaya untuk memberikan pengaruh terhadap perilaku orang lain dalam pemilu yang menggunakan imbalan tertentu. Sedangkan Johny Lomulus, menilai praktik politik uang sebagai sebuah tindakan dengan memberikan sejumlah uang kepada pimpinan suatu partai. Tujuannya, agar ia dapat dicalonkan sebagai salah satu kandidat calon pimpinan daerah dan atau memberikan kepada masyarakat supaya dukungan suara masyarakat diberikan kepada calon yang bersangkutan tersebut (Ananingsih, 2016).

Secara detail Aspinall menjelaskan bahwa politik uang adalah memberikan sejumlah uang, jasa, ataupun keuntungan ekonomi lainnya seperti pekerjaan maupun kontrak dalam bentuk sebuah proyek yang dilakukan oleh seorang praktisi politik. Jika yang dituju adalah individu, politik uang dapat berupa amplop yang berisi uang maupun barang. Adapun untuk kelompok, politik uang juga dapat berupa penyediaan fasilitas seperti lapangan sepak bola untuk para pemuda di kampung. Dana yang didistribusikan kepada pemilih bertujuan untuk membeli suara pemilih yang berasal dari dana pribadi maupun dana publik atau disebut dengan proyek *pork barrel* yang sumber pembiayaannya melalui dana pemerintah (Sukmajati, 2015).

Politik uang adalah tindakan transaksional yang terjadi pada sebuah proses politik melalui pembagian uang maupun barang, baik itu milik pribadi maupun partai politik guna mempengaruhi pilihan politik masyarakat. Sedangkan dalam Pasal 73 ayat (1) menjelaskan bahwa calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.

Menurut Sasano, politik uang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh tiga aspek di dalamnya yaitu politisi, partai politik dan pemilih. Politik uang juga dapat terjadi saat partai politik mengusulkan nama sebagai calon kandidat hingga pencarian dukungan suara rakyat pada pemilihan umum. Ketika pemilihan langsung, tolak ukur untuk menentukan hak pilih rakyat adalah politik uang yang bertujuan untuk mendapatkan suara dari hak pilih rakyat pada pemilihan umum langsung (Suprianto, 2017).

Perilaku politik uang menurut Erdwads Aspinall dan Ward Berenschot (2019), merupakan sebuah fenomena klientelisme dan patronase. Klientelisme merupakan sebuah bentuk pertukaran yang sifatnya *particular*, memiliki ciri bahwa terdapat kewajiban dan relasi kuasa yang berjalan tidak seimbang. Selain itu, aktivitas patron sebagai penyedia sarana-sarana untuk klient.

Sehingga pola hubungan dapat terbentuk dengan baik dan saling menguntungkan satu sama lain. Menurut Bumke dalam (Abdurrohman, 2021), Secara umum kategorisasi politik uang masuk dalam tiga dimensi yaitu, *vote buying*, *vote broker*, dan korupsi politik. Hal senada juga ditegaskan oleh Edwad Aspinall, menurutnya praktik politik uang adalah suatu istilah orang Indonesia yang memiliki keterkaitan dengan *vote buying* dan sebuah fenomena di dalamnya. Bagi Edward, selain *vote buying*, bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam pola politik uang ialah *vote broker* atau tim sukses (Aspinall, 2019). Pada hari 2 menjelang pemilihan, para pekerja kampanye atau tim sukses

menjalankan tugas pelelangan mereka ke jalan-jalan raya dan mengunjungi rumah ke rumah dalam bentuk yang kita kenal sebagai “serangan fajar” yang mana mereka membagikan uang dalam nominal yang cukup besar kepada pemilih (Barenschoot, 2019).

2.1.2 Bentuk Politik Uang

Relasi antar kandidat maupun antar penerima keuntungan dari malpraktik politik uang menjadi penyebab adanya politik uang tersebut. Baik itu secara langsung oleh kandidat atau melalui seorang perantara yang memiliki kedekatan dengan salah satu kandidat. Menurut Aspinall, terdapat empat pemaknaan yang membentuk politik uang jika ditinjau dari konteks kultur. Yaitu, pembelian suara (*vote buying*), pemberian secara pribadi (*individual gifts*), serta pemberian barang yang ditujukan untuk kelompok tertentu (*club goods*) (Sukmajati, 2015).

1. Pembelian Suara (*Vote Buying*)

Pembelian suara (*vote buying*) dimaknai sebagai distribusi kekayaan oleh kandidat pemilu kepada para pemilih dengan pola yang sistematis menjelang pemilihan. Harapannya agar para pemilih (penerima) akan memberikan dukungan suara kepada kandidat pemilu (pemberi). Di Indonesia, terdapat istilah-istilah yang biasa dipakai untuk menggambarkan praktik pembelian suara. Misalnya, serangan fajar atau ada juga serangan duha, yang merupakan istilah untuk menggambarkan realitas bahwa praktik pembelian suara dapat terjadi diwaktu-waktu tertentu pada hari dilaksanakannya pemungutan suara.

Praktik ini dilakukan secara sistematis, bahkan beberapa kandidat mempraktikkan pembelian suara dengan memobilisasi massa yang cukup besar untuk melakukan pendataan pemilih dan kemudian mendistribusikan uang tersebut kepada para pemilih.

Menurut Schafefer, terdapat beberapa karakteristik untuk memberikan pembeda antara *vote buying* dengan strategi mobilisasi dalam bentuk lain pada pemilu yang memiliki acuan yaitu jangkauan, waktu, dan legalitas. Jika dari segi jangkauan, *vote buying* sama saja dengan patronase partikular (khusus). Memberikan keuntungan materil pada para pemilih maupun keluarga secara patronase instan, atau dapat didistribusikan kepada lingkungan sekitar termasuk kelurahan/desa.

Sedangkan dari segi waktu, pembelian suara dilaksanakan dimenit akhir agar dapat berpengaruh pada elektoral, biasanya pada hari sebelum pemungutan terkadang juga beberapa jam atau bahkan dihari penyelenggaraan pungutan suara. Dari segi legalitas, pembelian suara (*vote buying*) dianggap bertentangan dengan norma hukum dan hampir selalu dianggap ilegal. Sedangkan *pork barrel* ataupun kebijakan alokasi dianggap legal, sementara patronase masih samar-samar (KPU Bandung Barat, 2014).

2. Pemberian Barang Pribadi (*Individual Gift*).

Pemberian barang pribadi (*individual gift*) merupakan bagian dari pembelian suara. Biasanya para kandidat memberikan barang-barang pribadi seperti peralatan rumah tangga dan sembako kepada pemilih atau juga menyelenggarakan sebuah pesta rakyat. Para kandidat seringkali memaknai pemberian barang kepada pemilih bukan termasuk perbuatan pembelian suara, karena pembelian suara memiliki pola tertentu dalam skala besar dengan keterlibatan daftar pemilih yang rumit.

Sedangkan pemberian barang kepada pemilih merupakan hal yang dikehendaki oleh kandidat saja. Kita dapat melihat bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mana mayoritas penduduknya beragama Islam, dengan

demikian para kandidat akan berusaha melakukan pendekatan lain yaitu melalui agenda keagamaan.

Misalnya, merenovasi rumah ibadah, pembangunan pesantren, dan sanggar seni budaya. Kemudian, calon kandidat menggunakan uang tunai untuk membeli sarung, Al-Qur'an, dan sejadah yang dapat didistribusikan kepada masyarakat. Namun, tak hanya berbentuk bangunan saja, calon legislatif juga membuat sumbangan-sumbangan keagamaan lain seperti ketika bertepatan hari Idul Adha sumbangan kandidat dapat berupa pemotongan hewan qurban dan dagingnya didistribusikan kepada masyarakat sekitar (Aspinall M. U., 2015).

3. Pemberian Barang Kelompok (*Club Goods*)

Pemberian barang untuk kelompok ini dimaknai sebagai bagian dari patronasi yang lebih memberikan keuntungan kelompok daripada keuntungan individu atau biasa disebut sebagai proyek gentong babi (*Pork Barrel Projects*). Pada umumnya, proyek gentong babi adalah proyek-proyek yang dibentuk pemerintah dengan sasaran masyarakat di wilayah geografis tertentu. Karakter utamanya ialah kegiatan-kegiatan ini ditargetkan untuk publik dengan dana yang bersumber dari dana publik dan harapannya dikemudian hari kelak publik akan memberi dukungan politiknya kepada kandidat tertentu (Sukmajati, 2015).

Biasanya calon kandidat berjanji memberikan program-program yang dapat didanai dengan dana publik dan berharap bahwa Masyarakat akan memberikan dukungannya kembali di pemilihan selanjutnya. Selain itu, para kandidat juga seringkali menggunakan proyek-proyek ini untuk membentuk klien. Sehingga klien atau yang disebut penerima keuntungan dari proyek gentong babi direkrut untuk menjadi bagian tim kampanye kandidat tertentu. Contohnya

proyek perbaikan drainase, perbaikan jalan, pembangunan rumah ibadah, dan pengadaan perlengkapan ibadah (Sukmajati, 2015).

2.2 Perilaku Politik

2.2.1 Definisi Perilaku Politik

Menurut (Sastroatmodjo, 1995), perilaku politik adalah salah satu tindakan yang erat kaitannya pada sebuah proses dalam pembentukan maupun pelaksanaan dari kebijakan politik hingga sampai kepada pengambilan keputusan. Hal ini dilaksanakan agar dapat mewujudkan tujuan atau keinginan masyarakat, karena perilaku politik itu sendiri memiliki tujuan bahwa keinginan masyarakat dapat terwujud dalam hal perbaikan sistem politik yang berlaku supaya kehidupan berjalan dengan aman dan damai.

Sedangkan (Plano, 1985), menerangkan bahwa perilaku politik adalah pemikiran yang memiliki sumber dalam diri sendiri. Yaitu, meliputi persepsi, sikap, dan segala tindakan berkaitan dengan sistem politik yang berlaku pada sebuah negara. Misalnya, kegiatan dalam pemilu termasuk pemungutan suara (*voting*), kampanye politik, gerakan dalam mencari pendukung dan simpatisan untuk calon serta lobi-lobi (Aminudin, 2011).

Perilaku memilih menurut (Surbakti, 2010), merupakan aktivitas yang dilakukan individu pada pemungutan suara berkaitan dengan keputusannya di pemilihan umum untuk memilih ataupun tidak memilih. Perilaku secara umum diartikan sebagai reaksi seseorang terhadap adanya stimulus (kelakuan) di luar dirinya. Sedangkan dalam politik, diartikan sebagai reaksi seorang pemilih yang dipengaruhi faktor dari luar diri.

2.2.2 Faktor Perilaku Politik

Menurut Ramlan Surbakti, terdapat beberapa yang memberikan pengaruh terhadap perilaku politik. Yaitu:

1. Lingkungan sosial politik secara tidak langsung, yaitu sistem ekonomi, sistem budaya, politik, dan media massa.
2. Lingkungan sosial politik secara langsung, yaitu kepribadian masyarakat yang terbentuk melalui keluarga, kelompok pergaulan, maupun agama.
3. Struktur kepribadian, yaitu cerminan sikap dari setiap orang.
4. Lingkungan sosial politik langsung dalam hal ini ialah situasi, yaitu pengaruh keadaan secara langsung terhadap masyarakat saat ingin melakukan suatu kegiatan. Misalnya cuaca, kondisi ruang, kondisi keluarga, hadirnya orang lain, situasi kelompok dan suatu ancaman dari berbagai bentuk.

Masyarakat secara langsung mendapatkan nilai-nilai dan norma-norma sosial melalui lingkungan sosial internal masyarakat, termasuk nilai-nilai dan norma-norma kehidupan bernegara pada khususnya, serta pengalaman hidup bermasyarakat pada umumnya. Yang mana faktor lingkungan sosial politik dapat melalui aktivitas seperti sosialisasi, internalisasi maupun aktivitas politik. Lebih lanjut, masyarakat secara tidak langsung dipengaruhi pula oleh lingkungan sosial politik masyarakat berkaitan dengan situasi dan kondisi. Faktor lingkungan sosial politik dalam wujud aktivitas seperti sosialisasi, internalisasi, maupun aktivitas sosial kemudian akan berpengaruh terhadap struktur kepribadian ataupun sikap perilaku pemilih.

2.2.3 Pendekatan Perilaku Memilih

Menurut (Nursal, 2004), faktor yang mempengaruhi perilaku memilih dapat dianalisis melalui beberapa pendekatan. Yaitu, pendekatan Sosiologis, Psikologis, dan Pilihan Rasional.

1. Pendekatan Sosiologis (Sosial Struktural)

Pendekatan ini lebih mengarah pada pandangan bahwa aktivitas memilih mempunyai keterkaitan yang erat dengan konteks sosial. Secara konkret, pada pemilihan umum, latar belakang demografi

maupun kondisi sosial ekonomi cenderung mempengaruhi seseorang dalam menentukan pilihan politiknya. Misalnya seperti pekerjaan kandidat, pemasukan, tempat tinggal, pembelajaran, jenis kelamin kandidat, kelas sosial dan termasuk juga agama yang dianut oleh kandidat.

Keterkaitan predisposisi dalam sosial ekonomi pemilih beserta keluarga dengan perilaku politik pemilih memiliki kaitan yang erat. Dapat dikatakan bahwa kecenderungan sosial ekonomi pemilih sekaligus keluarga pemilih memiliki keterkaitan erat terhadap perilaku pemilih secara signifikan. Hal itu dapat digambarkan dengan preferensi politik pada suatu keluarga, seperti pilihan politik dari seorang ayah maupun seorang anak. Selain itu, terbentuknya kecenderungan tersebut juga muncul akibat dari tingkat sosial ekonomi dapat melalui daerah tempat tinggal, agama yang dianut, ciri demografis, kelas sosial, dan lain-lain (Surbakti, 2010).

2. Pendekatan Psikologis

Pendekatan ini memahami bahwa seorang pemilih mempunyai tingkah laku yang cenderung dipengaruhi oleh adanya interaksi terhadap dua aspek. Yaitu, aspek internal maupun aspek eksternal pada lingkungan masyarakat tertentu. Selain itu, pendekatan ini memberikan pemahaman mengenai perilaku (*attitude*) maupun harapan (*expectation*) masyarakat yang kemudian menghasilkan sebuah aksi maupun tingkah laku manusia yang berpedoman terhadap tuntutan sosial (*confirmity*).

Perilaku memilih pada pemilihan umum dapat digambarkan dengan satu konsep psikologi sosial yaitu melalui identifikasi partai. Konsep ini beranggapan bahwa pemilih maupun partai-partai memiliki ikatan emosional antara pemilih dengan partai tertentu. Fokus Pendekatan psikologis ini lebih mengarah pada konsep sosialisasi

dan perilaku yang merupakan variabel utama untuk menggambarkan perilaku memilih, sedangkan pengelompokan sosial tidak begitu mengarah dibandingkan dengan konsep sosialisasi pada pendekatan psikologis.

Menurut pendekatan psikologis, para pemilih akan memastikan pilihan politik kepada seorang kandidat yang datang dari pengaruh kekuatan psikologis. Kemudian dalam diri pemilih tumbuh sebagai produk dari sosialisasi yang diterima dan dipahami (Surbakti, 2010).

3. Pendekatan Pilihan Rasional

Pendekatan pilihan rasional ini memiliki perspektif bahwa pemilih hanya akan memilih bila mendapatkan timbal balik yang seimbang dari apa yang diterima. Bila pemilih merasa tidak mendapatkan manfaat dari kandidat yang mencalonkan, maka pemilih cenderung tidak mengikuti rangkaian proses pemilu dan memilih tidak menggunakan hak pilihnya.

Pendekatan ini cenderung lebih memandang keuntungan dan kerugian dalam berperilaku sebagai pemilih. Hal yang dipandang bukanlah ongkos memilih, melainkan perolehan suara yang terakumulasi bisa memberikan pengaruh pada hasil. Seringkali orang yang mencalonkan diri dalam pemilu melakukan hal ini. Aspek pemahaman pemilih merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam pendekatan rasional, dan sering berpandangan yang bersumber pada anggapan sederhana bahwa setiap orang akan senantiasa mengutamakan *self-interest* (Wahyudi, 2016).

Pilihan politik pemilih selalu terpengaruh oleh berbagai aspek. Pertama, wajib menguasai konteks dari latar belakang sejarah. Perilaku pemilih banyak dipengaruhi sejarah masa lalu. Nuansa sejarah dan kebudayaan masih melekat pada budaya politik di

Indonesia. Hal ini menjadi pengaruh terhadap pilihan politik pemilih pada aspek yang pertama. Kedua, kondisi geografis dan daerah. Kondisi geografis ataupun daerah menjadi pertimbangan khusus dalam memberikan pengaruh terhadap perilaku politik seseorang seperti pengambilan keputusan, peraturan, maupun kebijakan yang mencakup pemilihan umum. Upaya tersebut mengharuskan para kandidat untuk pandai membuat strategi berkampanye agar kandidat tersebut mendapatkan dukungan suara dari masyarakat dalam pemilihan umum. Ketiga, merupakan pilihan rasional yang mana pemilih selalu menjadikan untung rugi sebagai dasar pertimbangan pilihan politiknya.

Dalam konteks pemilu, pilihan rasional (*rasional choice*) ini merupakan suatu pendekatan dalam menentukan pilihan politik pada pemilihan umum. Yaitu, lebih mengutamakan pemikiran logis dan mempertimbangkan keuntungan serta kerugian yang didapatkan pemilih dari sebuah pilihan politik tersebut.

2.3 Politik Uang dalam mempengaruhi Perilaku Politik pada Pemilihan

Legislatif

Kegiatan politik yang menginterpretasikan proses seseorang dalam memilih pilihan politiknya disebut sebagai perilaku politik. Perilaku politik termasuk perilaku yang kompleks karena banyak dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, perilaku politik dominan dipengaruhi lingkungan sosial politik langsung berupa situasi menurut (Surbakti, 2010), yaitu pengaruh keadaan langsung saat masyarakat ingin melakukan sesuatu, teror dan politik uang. Masyarakat sebagai aktor sosial dapat mempertimbangkan keuntungan dan kerugian yang diperoleh dari praktik politik uang tersebut karena sejatinya manusia memilih tindakan rasional diantara perilaku alternatif berdasarkan perhitungan untung dan rugi atau mencerminkan biaya dan ganjaran (*cost and reward*).

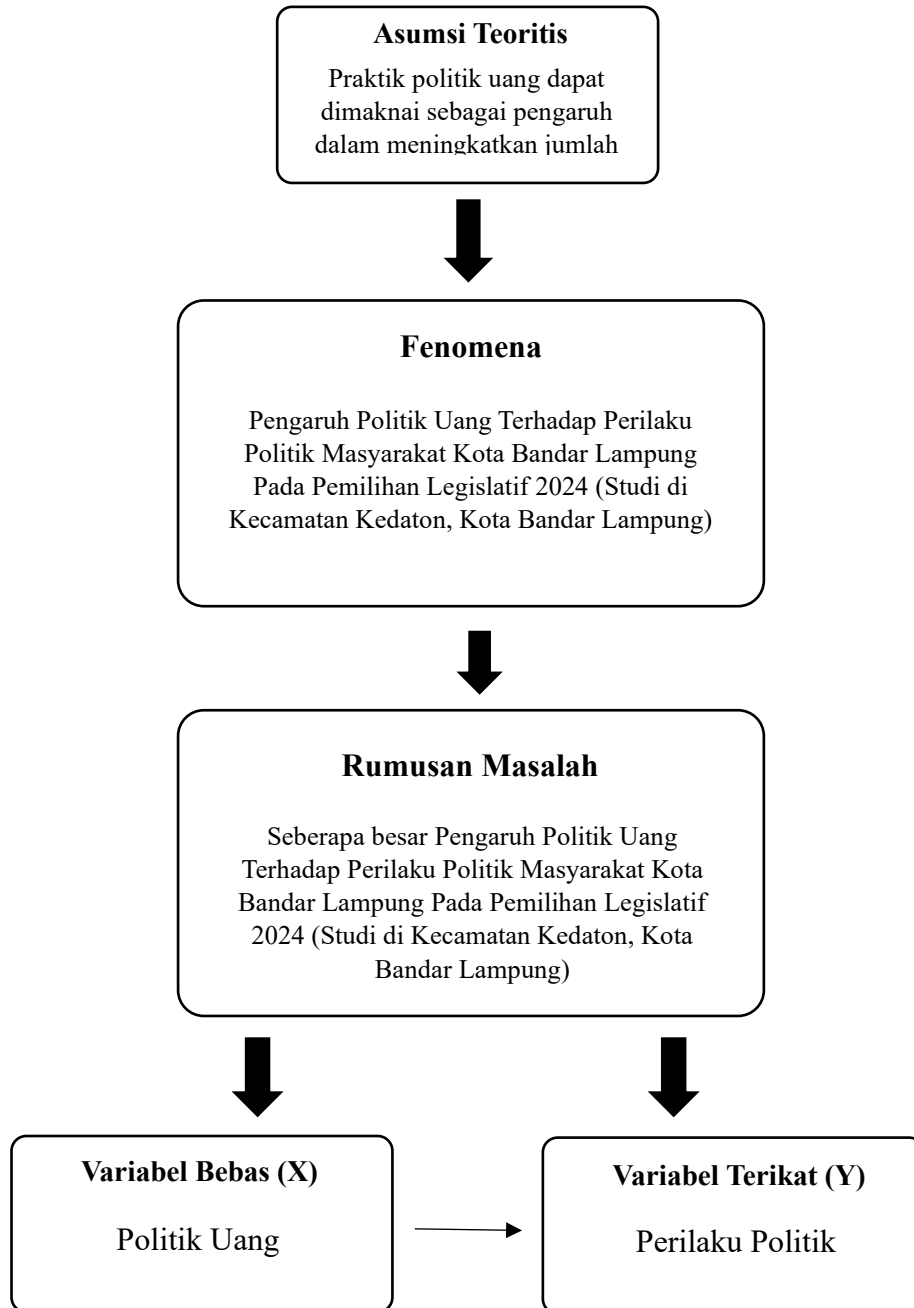
Akibatnya masyarakat menggunakan pertimbangan tersebut dalam menentukan pilihan mereka pada pemilihan legislatif. Jika semakin tinggi ganjaran (*reward*) yang didapatkan oleh masyarakat dari praktik politik maka kemungkinan besar perilaku tersebut juga akan diulang. Sebaliknya, jika semakin tinggi biaya (*cost*) ataupun ancaman (*punishment*) berupa hukuman yang didapatkan oleh masyarakat maka kemungkinan kecil perilaku tersebut juga akan diulang (Malo, 2022).

Menurut Charles F. Andrian dalam (Damsar, 2015), kekuasaan dapat dipahami sebagai pemanfaatan sumber daya berupa aset kemampuan dalam rangka mendapatkan kepatuhan tingkah laku seseorang sesuai keinginannya. Dalam upaya memperoleh kekuasaan, seseorang membutuhkan sumber daya yang digunakan untuk menunjang usahanya tersebut. Adapun salah satu sumber daya yang digunakan adalah sumber daya ekonomi, karena menurut Charles ekonomi mampu melaksanakan berbagai usaha yaitu melalui kepemilikan sumber daya ekonomi untuk mendapatkan apa yang menjadi target dalam hal ini adalah kekuasaan.

Konsep politik uang pada penelitian ini, peneliti menganalisis fenomena politik uang yang terjadi pada pemilihan legislatif di Kota Bandar Lampung tahun 2024. Aspinall menjelaskan bahwa politik uang adalah memberikan sejumlah uang, jasa, ataupun keuntungan ekonomi lainnya seperti pekerjaan maupun kontrak dalam bentuk sebuah proyek yang dilakukan oleh seorang praktisi politik. Jika yang dituju adalah individu, politik uang dapat berupa amplop yang berisi uang maupun barang. Adapun untuk kelompok, politik uang juga dapat berupa penyediaan fasilitas seperti lapangan sepak bola untuk para pemuda di kampung. Dana yang didistribusikan kepada pemilih bertujuan untuk membeli suara pemilih yang berasal dari dana pribadi maupun dana publik atau disebut dengan proyek *pork barrel* yang sumber pembiayaannya melalui dana pemerintah (Sukmajati, 2015).

Sedangkan konsep perilaku politik pada penelitian ini dilihat melalui tiga pendekatan menurut (Nursal, 2004), yaitu pendekatan sosiologis yang berdasar pada latar belakang demografi maupun kondisi sosial ekonomi, psikologis yang berkaitan dengan perilaku dan harapan, dan pilihan rasional yang berdasar pada manfaat yang diterima masyarakat.

2.4 Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka Pikir
Sumber : Data diolah peneliti, 2024.

2.5 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2018) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah, selanjutnya akan dibuktikan kebenarannya secara empiris berdasarkan data di lapangan. Dalam penelitian ini yang berjudul tentang Pengaruh Politik Uang Terhadap Perilaku Politik Masyarakat Kota Bandar Lampung Pada Pemilihan Legislatif 2024 (Studi di Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung).

Keberadaan praktik politik uang di Indonesia saat ini banyak terjadi di Indonesia. Sehingga, dengan menggunakan praktik politik uang dapat mendapatkan suara masyarakat dengan mudah. Berdasarkan pendapat di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

Ho : “Tidak ada pengaruh politik uang terhadap perilaku politik masyarakat Kota Bandar Lampung pada pemilihan legislatif 2024 di Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung”.

Ha : “Ada pengaruh politik uang terhadap perilaku politik masyarakat Kota Bandar Lampung pada pemilihan legislatif 2024 di Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung”.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan peneliti ialah metode penelitian kuantitatif korelasional yang memiliki tujuan untuk mengujikan dua variabel pada penelitian peneliti ini. Adapun variabel tersebut terdiri dari Politik Uang dan Perilaku Politik. Menurut (Creswell, 2014) kuantitatif korelasional dapat digunakan untuk pengukuran maupun pengujian terhadap dua variabel atau lebih dengan metode statistik.

Pendekatan kuantitatif ini merupakan salah satu jenis penelitian yang berlandaskan filsafat *positivisme* dimana secara spesifik metode tersebut terencana, tersistematis dan juga terstruktur dengan jelas mulai dari pertama hingga pembuatan desain penelitian untuk meneliti sebuah populasi dan sampel. Secara definisi penelitian kuantitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menggambarkan pengukuran yang memiliki banyak variabel, mulai dari pengumpulan, data hingga pengukuran itu sendiri (Siyoto, 2015).

Metode ini digunakan sebagai cara yang dilakukan oleh peneliti agar dapat menjelaskan secara lengkap mengenai pengaruh politik uang, sampel dari suatu populasi ditentukan dengan kriteria yang telah ditetapkan dan melalui pengujian hipotesis sehingga dapat diketahui ada atau tidaknya pengaruh pengaruh politik uang terhadap perilaku politik masyarakat Kota Bandar Lampung pada pemilihan legislatif 2024 di Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendefinisikan dan mengumpulkan fakta yang diteliti yaitu pengaruh politik uang terhadap perilaku politik masyarakat Kota Bandar Lampung pada pemilihan legislatif

2024 (Studi di Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung). Penelitian ini akan menjelaskan makna hubungan antara variabel bebas (politik uang) dan variabel terikat (perilaku politik) secara lengkap kajian akademik dan empirik dapat dipertanggungjawabkan.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berlangsung di Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung. Alasan penelitian ini dilakukan di tempat tersebut ialah karena data dan informasi yang ingin diperoleh dalam penelitian ini terdapat di lokasi tersebut. Perolehan data dan informasi ini tentu dalam rangka menjawab fokus penelitian.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian menurut Moloeng (2014) yaitu inti yang didapatkan dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperoleh dari studi keputusan ilmiah. Fokus penelitian sangat penting karena hal ini merupakan garis besar dari suatu pengamatan penelitian, yang menentukan arah dari observasi dan analisa hasil penelitian.

Fokus penelitian ini ialah melihat adakah pengaruh politik uang terhadap perilaku politik masyarakat Kota Bandar Lampung pada pemilihan legislatif 2024 di Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.

3.4 Sumber Data

Sumber data penelitian dalam penelitian ini antara lain:

3.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Sumber data ini adalah responden yang diperoleh melalui hasil kuesioner yang dibagikan kemudian dilakukan wawancara untuk memperoleh informasi tambahan berkaitan dengan penelitian ini. Data primer diperlukan sebagai data untuk memperoleh hasil yang akurat sehingga data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan penelitian, baik

dari hasil kuesioner maupun wawancara kepada responden.

Dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian secara langsung. Menggunakan metode survei dengan menyebarkan kuesioner kepada masyarakat yang terdaftar sebagai daftar pemilih tetap Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.

3.4.2 Data Skunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada. Data sekunder ini dipergunakan sebagai pendukung. Sumber data ini antara lain dokumentasi, undang-undang, buku-buku, jurnal, dan informasi lainnya yang diperoleh dari internet yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data sekunder, dalam penelitian ini memerlukan data-data berupa arsip daftar pemilih tetap Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.

3.5 Definisi Konseptual dan Operasional

3.5.1 Definisi Konseptual

Definisi konseptual digunakan untuk mengetahui penarikan batasan yang menjelaskan suatu konsep dengan singkat, jelas, dan tegas. Definisi konseptual pada variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Politik Uang

Aspinall menjelaskan bahwa politik uang adalah memberikan sejumlah uang, jasa, ataupun keuntungan ekonomi lainnya seperti pekerjaan maupun kontrak dalam bentuk sebuah proyek yang dilakukan oleh politisi. Jika yang dituju adalah individu, politik uang dapat berupa amplop yang berisi uang maupun barang. Adapun untuk kelompok, politik uang juga dapat berupa penyediaan fasilitas seperti lapangan sepak bola untuk para pemuda di kampung. Menurut Sasano, politik uang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh tiga aspek di dalamnya yaitu politisi, partai politik dan pemilih.

Menurut Sasano, politik uang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh tiga aspek di dalamnya yaitu politisi, partai politik dan pemilih. Politik uang dapat terjadi saat partai politik mengusulkan nama sebagai calon kandidat hingga pencarian dukungan suara rakyat pada pemilihan umum. Ketika pemilihan langsung, tolak ukur untuk menentukan hak pilih rakyat adalah politik uang. Distribusi uang yang terjadi tidak hanya pada masyarakat lapisan atas dan tengah, tetapi lapisan bawah pula, seperti rakyat yang bisa saja menerima dana lebih besar dari calon, karena para calon bertujuan untuk mendapatkan suara dari hak pilih rakyat pada pemilihan umum langsung (Suprianto, 2017).

2. Perilaku Politik

Menurut (Sastroatmodjo, 1995), perilaku politik adalah salah satu tindakan yang erat kaitannya pada sebuah proses dalam pembentukan maupun pelaksanaan dari kebijakan politik hingga sampai kepada pengambilan keputusan. Hal ini dilaksanakan agar dapat mewujudkan tujuan atau keinginan masyarakat, karena perilaku politik itu sendiri memiliki tujuan bahwa keinginan masyarakat dapat terwujud dalam hal perbaikan sistem politik yang berlaku supaya kehidupan berjalan dengan aman dan damai.

Sedangkan faktor yang mempengaruhi perilaku memilih dapat dianalisis melalui pendekatan Sosiologis, pendekatan Psikologis, dan pendekatan Pilihan Rasional (Nursal, 2004).

3.5.2 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah aspek penting dalam penelitian sebagai sebuah petunjuk yang memberikan gambaran mengenai metode untuk mengukur suatu variabel penelitian. Definisi operasional berisi penjelasan mengenai informasi ilmiah yang dapat digunakan peneliti lain bila menggunakan variabel yang sama pada penelitiannya.

Tujuannya agar dapat diketahui metode pengukuran dengan konsep yang sama pula (Sulistiyanto, 2022).

1. Politik Uang

Aspinall menjelaskan bahwa politik uang adalah memberikan sejumlah uang, jasa, ataupun keuntungan ekonomi lainnya seperti pekerjaan maupun kontrak dalam bentuk sebuah proyek yang dilakukan oleh politisi. Jika yang dituju adalah individu, politik uang dapat berupa amplop yang berisi uang maupun barang. Adapun untuk kelompok, politik uang juga dapat berupa penyediaan fasilitas seperti lapangan sepak bola untuk para pemuda di kampung. Menurut Sasano, politik uang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh tiga aspek di dalamnya yaitu politisi, partai politik dan pemilih.

Indikator-indikator politik uang yang digunakan untuk mengukur politik uang adalah:

- a. Pembelian Suara (*Vote Buying*), mencakup pemberian uang saat kampanye, pemberian uang secara langsung ke rumah (serangan fajar), pemberian uang dengan metode transfer rekening dan pemberian uang dengan nominal tertentu sesuai proposal.
- b. Pemberian barang pribadi (*individual gift*), mencakup pemberian bantuan sembako, masyarakat menengah kebawah sebagai target, pemberian dilakukan secara berkala, memberikan hadiah dalam bentuk barang, dan pemberian atribut kampanye.
- c. Pemberian barang kelompok (*club goods*), mencakup menjanjikan jabatan tertentu, dan menjanjikan fasilitas umum.

2. Perilaku Politik

Menurut (Sastroatmodjo, 1995), perilaku politik adalah salah satu tindakan yang erat kaitannya pada sebuah proses dalam pembentukan maupun pelaksanaan dari kebijakan politik hingga sampai kepada pengambilan keputusan. Hal ini dilaksanakan agar

dapat mewujudkan tujuan atau keinginan masyarakat, karena perilaku politik itu sendiri memiliki tujuan bahwa keinginan masyarakat dapat terwujud dalam hal perbaikan sistem politik yang berlaku supaya kehidupan berjalan dengan aman dan damai.

Adapun dalam penelitian ini indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur perilaku politik adalah:

- a. Pendekatan Sosiologis, mencakup faktor suku, agama, ekonomi, pekerjaan, pendidikan dan jenis kelamin.
- b. Pendekatan Psikologis, mencakup isu yang berkembang, kerabat merupakan partisipan partai, karakter calon legislatif, popularitas calon legislatif, ideologi partai, dan mengenal calon legislatif.
- c. Pendekatan Pilihan Rasional, mengenal kinerja partai, hasil nyata kinerja calon legislatif, kebijakan partai/calon legislatif, dan perubahan kehidupan.

Tabel 1 Definisi operasional dari variabel yang akan diteliti

No	Variabel	Indikator
1	Politik Uang (Variabel X)	Pembelian suara (<i>vote buying</i>) Pemberian barang pribadi (<i>individual gift</i>) Pemberian barang kelompok (<i>club goods</i>)
2.	Perilaku Politik (Variabel Y)	Pendekatan sosiologis Pendekatan psikologis Pendekatan pilihan rasional

(Sumber: diolah oleh peneliti tahun 2024)

3.6 Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki mutu serta ciri tertentu yang diresmikan oleh seorang peneliti guna dipergunakan untuk dipelajari sehingga, kemudian akan ditarik kesimpulan untuk hasil akhirnya (Sugiyono, 2019).

Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah masyarakat yang mempunyai hak secara hukum dan memenuhi persyaratan sebagai daftar calon tetap pemilih pemilu 2024 di Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.

Tabel 2 Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung

Kecamatan	Jumlah TPS	L	P	L+P
Kedaton	143	19.875	20.177	40.052

Sumber: KPU Kota Bandar Lampung (diolah peneliti, 2024).

Berdasarkan data maka jumlah populasi daftar pemilih tetap di Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung sebanyak 40.052 pemilih.

3.7 Sampel

Sampel menurut (Bahri, 2018) merupakan bagian dari populasi yang diambil menggunakan cara-cara tertentu yang memiliki karakteristik tertentu. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dengan menggunakan instrumen kuesioner sebagai instrumen utama untuk pengumpulan data.

Selanjutnya, sampel yang berasal dari jumlah maupun karakteristik yang ada pada populasi (Sugiyono, 2019). Adapun dalam penelitian ini menggunakan teknik *probability sampling* dengan pendekatan *random sampling*. Menurut (Sugiyono, 2019), *random sampling* adalah pemungutan sampel dari populasi yang dilaksanakan acak tanpa memperhatikan secara cermat mengenai strata yang terdapat dalam populasi itu.

Oleh karena itu, untuk menentukan sampel pada penelitian ini, akan menggunakan rumus teknik slovin pengambilan sampel untuk populasi yang sudah diketahui dalam Siregar (2013) adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N \cdot d^2 + 1}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi penelitian

d = Tarif nyata (0,10)

Hasil Perhitungan:

$$n = \frac{40.052}{(40.052 \times 0,10^2) + 1}$$

$$n = \frac{40.052}{400,52 + 1}$$

$$n = 99$$

Sampel dalam penelitian ini ± 99 orang.

3.8 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

3.8.1 Kuesioner

Kuesioner merupakan suatu instrumen pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan beberapa pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada para responden untuk mereka jawab. (Sujarweni,2020). Kuesioner ini kemudian disebarakan kepada responden yaitu masyarakat di Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, untuk diisi atau dijawab kemudian setiap pertanyaan disediakan alternatif jawaban berjenjang dan setiap jenjang pertanyaan diberi skor yang tidak sama pada setiap jenjang jawabannya.

3.8.2 Dokumentasi

Teknik untuk mendapatkan data dengan cara mencari informasi dari berbagai sumber atau referensi yang terkait dengan penelitian seperti buku, undang-undang, arsip, data, jurnal, serta informasi lainnya yang diperoleh dari internet. Dokumen yang terdapat pada penelitian yang peneliti lakukan, yaitu hasil kuesioner responden

3.9 Teknik Penentuan Skor

Menurut Sugiyono (2019) setelah seluruh data yang diperoleh dalam penelitian diuraikan, maka pada tahap selanjutnya akan dilakukan pembahasan data yang telah diuraikan. Interpretasi data secara keseluruhan untuk masing-masing variabel dapat dilakukan setelah diklasifikasikan berdasarkan nilai-nilai yang diperoleh dari responden.

Skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi responden tentang fenomena sosial. Menggunakan skala *likert*, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrument di mana alternatifnya berupa pertanyaan atau pernyataan. Jawaban dari setiap item instrumen yang menggunakan skala *likert* mempunyai gradasi dari sangat positif sampai dengan sangat negatif (Sugiyono, 2018).

Tabel 3 Alternatif Jawaban dengan skala *likert*

Alternatif Jawaban	Bobot Nilai
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Netral	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: Sugiyono (2018:94)

Kemudian untuk menentukan kategori jawaban responden terhadap masing-masing alternatif apakah tergolong sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah maka dapat ditentukan kelas intervalnya dengan cara sebagai berikut:

$$\frac{\text{skor tertinggi} - \text{skor terendah}}{\text{banyak bilangan}}$$

3.10 Teknik Pengujian Instrumen

3.10.1 Uji Validitas

Hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2017). Kuesioner dikatakan valid ketika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Sebaliknya suatu alat ukur yang kurang valid memiliki validitas rendah.

$$r_{xy} = \frac{N \sum xy - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\sum x^2 - (\sum X)^2} \sqrt{N \sum y^2 - (\sum Y)^2}}$$

Keterangan :

r_{xy}	= koefisien antara variabel X dan Y
N	= jumlah sampel
$\sum xy$	= total perkalian skor X dan Y
$\sum y$	= jumlah skor variabel Y
$\sum x$	= jumlah skor variabel X
$\sum x^2$	= total kuadrat skor variabel X
$\sum y^2$	= total kuadrat skor variabel Y

3.10.2 Uji Realibilitas

Uji realibilitas adalah pengukuran kembali sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama untuk menghasilkan data yang sama. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan rumus *alpha cronbach*. Adapun rumus yang digunakan untuk mencari reliabilitas adalah sebagai berikut:

$$r_i = \left(\frac{n}{n-1} \right) \cdot \left(1 - \frac{\sum \sigma_i^2}{\sigma_i^2} \right)$$

Keterangan:

R_i	= Reliabilitas instrumen
$\sum \sigma_i^2$	= Varian butir soal
σ_i^2	= Varian total soal
n	= Banyaknya soal

Kriteria uji reliabilitas dengan rumus *alpha cronbach* apabila:

$r_i > r$ tabel, maka alat ukur tersebut reliabel

$r_i < r$ tabel maka alat ukur tidak reliabel.

3.11 Teknik Analisis Data

3.11.1 Uji Normalitas

Uji normalitas adalah sebuah uji yang dipakai dalam mendapatkan variabel dependen atau independen yang bersifat normal ataupun hampir normal pada distribusi data penelitian. Uji normalitas ini menggunakan uji Kolmogorov-Sminov dengan aplikasi SPSS. Uji ini menargetkan distribusi data pada satu variabel penelitian yang dapat diketahui. Data yang dianggap layak dan memenuhi syarat tersebut merupakan data yang berdistribusi normal agar dapat menjadi acuan dalam penelitian (Husein, 2011).

Uji normalitas adalah uji yang dilakukan pra-data berdasarkan proses pedoman penelitian. Pada uji ini dijadikan peneliti sebagai pra syarat agar mampu menganalisis data. Data yang layak dan memenuhi syarat dalam menunjukan pedoman penelitian disebut sebagai data berdistribusi normal. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan rumus Kolmogorov-Smirnov pada ujinormalitas data penelitian.

Data yang dikatakan berdistribusi normal tersebut bila nilai relevan lebih besar atau lebih tinggi dari 0,05 pada ($P > 0,05$). Namun, menjadi berkebalikan apabila nilai relevan lebih kecil atau lebih rendah dari 0,05 pada ($P < 0,05$), sehingga dapat dikatakan data tersebut berdistribusi tidak normal.

3.11.2 Uji Linearitas

Uji linearitas adalah prosedur statistik yang digunakan untuk mengevaluasi apakah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dalam model regresi linier memenuhi asumsi linearitas. Asumsi linearitas dalam regresi linier menyiratkan bahwa hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dapat dijelaskan dengan garis lurus atau polinomial tingkat pertama. Pentingnya uji linearitas adalah karena kesalahan dalam menentukan linearitas dapat menghasilkan model yang tidak tepat dan estimasi yang bias.

Uji linearitas merupakan uji yang dapat diimplementasikan untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y). Ada dan tidaknya hubungan tersebut maupun linear atau tidak dapat diketahui dengan melakukan uji ini. Uji linearitas pada umumnya dipakai sebagai sebuah prasyarat dari analisis regresi linear sederhana atau berganda. Menurut (Widana, 2020), kriteria pengambilan keputusan bisa dilakukan sebagai berikut:

1. Jika nilai *Sig. Deviation From Linearity* > 0.05 maka terdapat hubungan yang linear antara kedua variabel.
2. Jika nilai *Sig. Deviation From Linearity* < 0.05 maka tidak terdapat hubungan yang linear antara kedua variabel.

3.11.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah cara yang dapat digunakan sebagai alat pengujian mengenai perbedaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya dalam sebuah model regresi yang terjadi. Heteroskedastisitas dapat menyebabkan masalah dalam interpretasi hasil regresi, seperti menghasilkan estimasi yang tidak efisien atau tidak konsisten dari koefisien regresi. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi apakah heteroskedastisitas terjadi dalam model regresi dan, jika iya, untuk mengatasi masalah tersebut.

Dapat disebut homoskedastisitas apabila varians dari sebuah residual pengamatan ke pengamatan lainnya memiliki nilai yang tetap namun apabila berbeda disebut sebagai heteroskedastisitas. Model uji yang baik adalah yang tidak homoskedastisitas atau tidak terjadi masalah heteroskedastisitas (Pradana, 2019). Pada uji heteroskedastisitas menggunakan *spearman's rho* terdapat beberapa dasar dalam menentukan keputusan yaitu terjadi heteroskedastisitas jika besar nilai $\text{sig} < 0.05$, namun jika besar nilai $\text{Sig} > 0.05$ maka terjadi heteroskedastisitas.

3.11.4 Koefisien Determinasi

Menurut (Ghozali, 2013), koefisien determinan merupakan salah satu metode yang diimplementasikan dalam memahami kesesuaian maupun ketepatan terhadap variabel Y (dependen). Kemudian, hasilnya didapatkan dari proses mengkuadratkan koefisien korelasinya. Besaran koefisien determinan dapat diperoleh dengan persamaan yang diklasifikasikan pada analisis koefisien determinan yang berupa:

1. Jika K_d mendapatkan nilai satu (1), maka kesimpulannya adalah paparan dari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sangat tinggi.
2. Jika K_d mendapatkan nilai nol (0), maka kesimpulannya adalah dapat paparan dari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sangat rendah.

Koefisien determinan adalah tingkat pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikat Y . Rumus yang digunakan adalah:

$$r^2 = \frac{(a_1 \sum xy)}{\sum y^2}$$

Keterangan :

r^2 = Koefisien determinan antara Y dengan X

a_1 = Koefisien prediktor x

$\sum xy$ = Jumlah produk X dan Y

$\sum y^2$ = Jumlah kuadrat kriteria Y

3.11.5 Hipotesis

Berdasarkan pada fakta empiris yang diperoleh dari data yang telah dikumpulkan di lapangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan, bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah penelitian yang dinyatakan dengan bentuk kalimat berupa pertanyaan (Sugiyono, 2010). Disebut sementara karena jawaban yang diberikan hanya berdasarkan teori relevan, tidak berdasarkan pada fakta empiris yang diperoleh dari data yang telah dikumpulkan di lapangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis adalah sebuah jawaban yang bersifat teoritis dari rumusan masalah.

Penelitian ini menggunakan uji hipotesis parsial (Uji t). Menurut Ghazali (2013) uji t digunakan dalam menguji hipotesis dengan cara

parsial sebagai petunjuk adanya pengaruh dari tiap variabel Independen secara individu terhadap variabel dependen. Uji *t* merupakan pengujian koefisien regresi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen agar diketahui tingkat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun hipotesis penelitian ini berupa:

Ho: “Tidak ada pengaruh politik uang terhadap perilaku politik masyarakat Kota Bandar Lampung pada pemilihan legislatif 2024 di Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung”.

Ha: “Ada pengaruh politik uang terhadap perilaku politik masyarakat Kota Bandar Lampung pada pemilihan legislatif 2024 di Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung”.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, simpulan penelitian Pengaruh Politik Uang Terhadap Perilaku Politik Masyarakat Kota Bandar Lampung Pada Pemilihan Legislatif 2024 (Studi di Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung) sebagai berikut:

1. Penelitian ini menjelaskan bahwa politik uang memiliki pengaruh terhadap perilaku politik masyarakat Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung pada pemilihan legislatif 2024.
2. Pada penelitian ini nilai R Square yang diperoleh pada uji koefisien determinasi menunjukkan nilai sebesar 0.482 artinya bahwa politik uang memberikan pengaruh terhadap perilaku politik sebesar 48,2%.
3. Politik uang cenderung mengurangi nilai-nilai demokrasi masyarakat dalam berpolitik, dan menurunkan partisipasi politik yang sehat atau menyebabkan perilaku politik yang tidak sehat, sehingga masyarakat memilih berdasarkan uang atau barang yang diterima daripada berdasarkan penilaian terhadap calon atau partai.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah dikemukakan, maka saran yang dapat peneliti berikan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peneliti merekomendasikan agar masyarakat dapat memahami dampak dari politik uang dan menolak segala bentuk politik uang.
2. Bawaslu dan KPU sebagai lembaga pemilu harus mengadakan pendidikan politik secara berkala sebelum pemilu dilaksanakan agar masyarakat dapat memahami dampak negatif politik uang dan dampak jangka panjang ketika masyarakat salah memilih pemimpin.
3. Calon legislatif harus membentuk pemikiran bahwa politik uang tidak dapat menjamin kepastian perolehan jumlah suara yang didapatkan dari hasil praktik uang tersebut. Sedangkan dana yang dikeluarkan sudah pasti menguras harta caleg yang tidak sebanding dengan hasil yang didapatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrohhman. 2021. Dampak Fenomena Politik Uang dalam Pemilu dan Pemilihan. *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*.
- Amru, T. H., Syam, H. M., & Susilawati, N. 2021. Dampak Mengakses Instagram@ pinterpolitik terhadap Perilaku Politik Generasi Z pada Pemilu 2019. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 6(2).
- Aminudin, S. 2011. Perilaku Politik di Indonesia. *Jurnal Aspirasi*, 5.
- Ananingsih, S. W. 2016. Tantangan dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang pada Pilkada Serentak 2017. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 45(1), 50-51.
- Aspinall, E. 2019. Guns for Hire and enduring machines: Clientelism Beyond Parties in Indonesia and The Philipines. *Journal Democratization*, 27(1).
- Aspinall, M. U. 2015. The Patronase Patchwork in Village brokerage networks and power of the state in Indonesia.
- Azka, N. 2021. Persepsi Masyarakat terhadap Money Politik pada Pemilihan Legislatif 2019 di Kabupaten Bireuen (Studi Kasus : Gampong Pulo Naleung. *Skripsi S1 UIN Ar-Raniry Aceh*.
- Bahri, S. 2018. *Metodologi Penelitian Bisnis Lengkap dengan teknik Pengolahan Data SPSS*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET
- Barenschoot, E. a. 2019. *Democracy for Sale: Pemilihan Umum, Klientelisme dan Negara di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.

- Budiadjo, M. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, J. W. 2014. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Damsar. 2010. *Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group.
- Damsar. 2015. *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- David, E. A. 1985. *Pengantar Analisa Politik*. Jakarta: LP3ES.
- Ghozali, I. 2013. *Desain Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Semarang: Yoga Pratama.
- Hadiyatna. D (2024, Maret). Sejumlah Oknum Penyelenggara Pemilu di Bandar Lampung Diduga Terima Uang dari Caleg Rp760 Juta. Dipetik Maret 12 2024, dari Antara News: <https://www.antaranews.com/berita/39990420/kpu-lampung-telah-klarifikasi>
- Hamid, I. 2020. *Perilaku Politik*. Mataram: Sanabil.
- Humaidi, Y. 2017. Politik Uang dan Perilaku Politik :Studi terhadap Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Umum Legislatif 2014 di Kelurahan Bangka, Jakarta Selatan. *Skripsi S1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 103.
- Husein, U. 2011. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi 11*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Juma'ah, S. H. 2017. Pengaruh Konflik Nahdlatul Wathan Terhadap Perilaku Politik Masyarakat Lombok Timur. *Jornal of Governance And Public Policy*, 4(3).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2019).

Malo, R. E. 2022. *Pola Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Legislatif periode 2019-2024 (Studi Kasus Masyarakat Pemilih di Tempat Pemungutan Suara 12 Kelurahan Maulafa Kecamatan Maulafa Kota Kupang)*. Skripsi S1 Universitas Nusa Cendana.

Martiah, S. (2022, Agustus). *Kampanye: Pengertian, Jenis, dan Teknik*. Dipetik Maret 08 2024, dari Gramedia: <https://www.gramedia.com/literasi/kampanye/amp/>

Mensana, F. 2020. Kepercayaan Politik dan Intensi Memilih: Perilaku Politik Pemilih Remaja Akhir di Surabaya Menjelang Pemilu 2019. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISPO)*, 10(1). Diambil kembali dari <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jispo/index>

Moloeng, L. J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Muhtadi, B. 2019. Politik Uang dan New Normal dalam Pemilu Pasca-Orde Baru. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 1(5), 61.

Muhtadi, B. 2019. *Vote Buying: The Mechanics of Electoral Bribery*. Singapura: Palgrave Macmillan.

Muhtadi, B. 2020. *Kuasa Uang: Politik dalam Pemilu Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Gramedia.

Nursal, A. 2004. *Political Marketing Strategy Memenangkan Pemilu*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Pamungkas. S (2024, Februari). Sejumlah Oknum Penyelenggara Pemilu di Bandar Lampung Diduga Terima Uang dari Caleg Rp760 Juta. Dipetik Maret 12 2024, dari Kupas Tuntas: <https://www.kupastuntas.co/2024/02/27/duh-oknum-anggota-kpu-bandar-lampungdiduga-terima-uang-530-juta-dari-caleg>

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye

Pradana, G. 2019. Sosiologi Pariwisata. *Denok Lest*, 1(1).

Rachmawati. (2024, Februari). Sejumlah Oknum Penyelenggara Pemilu di Bandar Lampung Diduga Terima Uang dari Caleg Rp760 Juta. Dipetik Maret 08 2024, dari Kompas.com: <https://regional.kompas.com/read/2024/02/28/133100678/sudah-keluarkan-uang-rp-760-juta-pria-di-lampung-gagal-jadi-caleg-kini?page=all>

Sastroatmodjo, S. 1995. *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Press.

Shabrina, S. I. 2018. Pengaruh Keluarga Terhadap Perilaku Politik Dilihat dari Latar Belakang Keluarga dan Sosialisasi Politik dalam Keluarga (Studi Kepada Mahasiswa Fakultas Bidang Sosial dan Sains UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. *Skripsi SI, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 175.

Siregar, S. 2017. Metode penelitian kuantitatif: dilengkapi dengan perbandingan perhitungan manual & spss. Jakarta: Kencana.

Siyoto, S. 2015. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Literasi Media Pubhling.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methodes)*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan dan Pendekatan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Sujarweni, V. W. 2020. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Sukmajati, E. A. 2015. *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: PolGov.
- Sulaiman. (2024, Februari). Sejumlah Oknum Penyelenggara Pemilu di Bandar Lampung Diduga Terima Uang dari Caleg Rp760 Juta. Dipetik Maret 08 2024, dari Rilis Id Lampung: <https://www.lampung.rilis.id/Politika/berita>.
- Sulistiyanto, A. 2022. *Konsep Dasar Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta.
- Sumartini. 2004. *Money Politik dalam Pemilu*. Jakarta: Badan Kehakiman Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
- Suprianto, D. 2017. *Analisis Politik Uang pada Pilkada Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015*. Yogyakarta: Tesis S2 Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Surbakti, R. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Suryani, L. 2019. Upaya Penanggulangan Badan Pengawas Pemilu Kota Mataram Terhadap Prktik Politik Uang Pada Pelaksanaan Pemilu 2019. Skripsi, 3.
- Wahyudi, M. F. 2016. Pembiaran Pada Potensi Konflik dan Kontestasi Semu Pemilukkada Kota Blitar : Analisis Institusionalisme Pilihan rasional. *Jurnal Politik Indonesia*.
- Wou, A. 2018. Persepsi masyarakat terhadap politik uang (money politic) dalam setiap pesta demokrasi di Kampung Soryar Distrik Biak Timur Kabupaten Biak Numfor. *Jurnal Gema Kampus*, 3(1).